

**PENGARUH PENDAPATAN DAN ASPEK KEBIJAKAN
PEMERINTAH TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM
DI MASA PANDEMI COVID-19
(UMKM DI BELOPA)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



17 0402 0166

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**PENGARUH PENDAPATAN DAN ASPEK KEBIJAKAN
PEMERINTAH TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM
DI MASA PANDEMI COVID-19
(UMKM DI BELOPA)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

Hendra Safri, SE., M.M.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nirmayasari

NIM : 17 0402 0166

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Penelitian Pengaruh Pendapatan Dan Aspek Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasikan dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

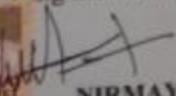
Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 10 September 2021

Yang membuat pernyataan




NIRMAYASARI
NIM 17 0402 0166

HALAMAN PENGESAHAN

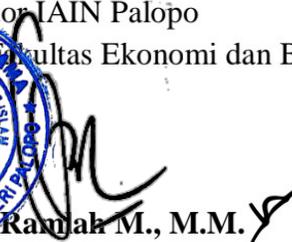
Skripsi berjudul Pengaruh Pendapatan dan Aspek Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi *Covid-19* (UMKM di Belopa) yang ditulis oleh Nirmayasari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0166 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 26 November 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|
| 1. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji I | () |
| 3. Megasari, S.Pd., M.Sc. | Penguji II | () |
| 4. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing I | () |

Mengetahui:


Rani Ramah M., M.M.
NIP 19610208 199403 2 001


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الازياء والمرسلين سيدنا

محمد وعولاله واصحابه (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut- pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pendapatan Dan Aspek Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembiayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19”

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta bapak dan ibu, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak- anaknya serta saudariku yang selama ini membantu mendoakanku. Mudah- mudahan Allah SWT., mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor IIDr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dr. Hj. Ramlah M., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, beserta Wakil Dekan I Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A, Wakil Dekan II Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Wakil Dekan III Dr. Takdir, S.H., M.H.
3. Hendra Safri, SE, M.M.selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Hendra Safri, SE, M.M.selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Para UMKM di Belopa yang telah bersedia menjadi narasumber dan sampel pada penelitian ini.
9. Kepada Kedua Orang tua saya bapak Sapada dan ibu Hasdiana yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyusunan Skripsi ini.
10. Terimakasih kepada sahabat saya Rezky Utari Putri, Isra Nurfaidah, Nurhalima, Nova Rasdin dan Rico saputra yang selalu mendukung dan membantu saya dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, dan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2017, terkhusus kepada teman saya perbankan syariah kelas E, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Amin

Palopo, 10 Agustus 2021

Penulis

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR AYAT	vi
DAFTAR HADIS	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	26
B. Landasan Teori	29
C. Kerangka pikir.....	29
D. Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
C. Definisi Operasional Variabel.....	31
D. Populasi dan Sampel	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Instrumen Penelitian.....	33
G. Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen	33
H. Teknis Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Surah An-Nisa Ayat 29	9
Surah Al- Baqarah Ayat 279	17



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis Tentang pembiayaan	9
--------------------------------	---



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	21
Tabel 3.2 Poin Penilaian	21
Tabel 4.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	29
Tabel 4.2 Jumlah Responden Berdasarkan Umur	29
Tabel 4.3 Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	29
Tabel 4.4 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Usaha.....	30
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Pendapatan (X1).....	30
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kebijakan Pemerintah (X2)	31
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Pembiayaan (Y).....	32
Tabel 4.8 Hasil Uji Realibilitas Variabel X1,X2,dan Y.....	32
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	33
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieitas	34
Tabel 4.11 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	36
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	36
Tabel 4.13 Hasil Uji T.....	38
Tabel 4.14 Hasil Uji F.....	39
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefesien Determinasi	40

IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kebijakan Pemerintah Di Sektor UMKM.....	18
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	18



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner penelitian
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 7 Kartu Kontrol
- Lampiran 8 Berita Acara
- Lampiran 9 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 10 Daftar Hadir Ujian
- Lampiran 11 Turnitin
- Lampiran 12 Nota Dinas Tim Verifikasi
- Daftar Riwayat Hidup



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nirmayasari, 2021. *“Pengaruh Pendapatan Dan Aspek Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembiayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hendra Safri.

Semakin berkembangnya suatu perekonomian atau perkembangan usaha dari suatu perusahaan maka perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Salah satu bentuk sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan adalah pembiayaan. Namun sektor pembiayaan UMKM memiliki resiko yang besar karena suatu usaha tidak ada yang memastikan apakah akan mendapat keuntungan atau justru akan mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang memiliki populasi dan sampel sebanyak 30 UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Belopa yang mengambil pembiayaan di Bank Syariah . Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan dan kebijakan pemerintah terhadap pembiayaan UMKM di masa pandemic covid-19. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi tersebut dapat diketahui bahwa R Square (R^2) menunjukkan bahwa variabel pembiayaan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan dan kebijakan pemerintah sebesar 0,252 atau 25,2%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.. Nilai Fhitung > Ftabel atau $4,536 > 3,34$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ atau $0,020 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel pendapatan dan kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia Cabang Belopa. Nilai koefisien regresi dari pendapatan (X1) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $(2,260) > t_{tabel}$ sebesar $(2,048)$ dan nilai sig. sebesar $(0,032) < (0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pendapatan terhadap pembiayaan UMKM di masa pandemi. Sedangkan nilai koefisien regresi kebijakan pemerintah (X2) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $(-1,670) < t_{tabel}$ sebesar $(2,048)$ dan nilai sig. sebesar $(0,106) > (0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif namun tidak signifikan antara kebijakan pemerintah terhadap penyaluran pembiayaan di bank syariah. Hal ini karena nasabah yang beranggapan bahwa ada beberapa pengaruh negatif dari kebijakan pemerintah di masa pandemi tapi tidak signifikan.

Kata Kunci : Pendapatan, Kebijakan Pemerintah, Pembiayaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya suatu perekonomian atau perkembangan usaha dari suatu perusahaan maka perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Salah satu bentuk sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan adalah pembiayaan.

Namun sektor pembiayaan UMKM memiliki resiko yang besar karena suatu usaha tidak ada yang memastikan apakah akan mendapat keuntungan atau justru akan mengalami kerugian. Pada masa pandemi ini omzet dan pendapatan UMKM sangat mengalami penurunan di bandingkan masa sebelum pandemi yang mengakibatkan banyaknya UMKM yang harus menutup usahanya di karenakan biaya yang kurang dalam operasional Usahanya. Salah satu langkah yang dilakukan UMKM dalam mempertahankan usahanya di masa pandemi adalah dengan mengambil pembiayaan di lembaga keuangan salah satunya yaitu di Bank Syariah.

Peraturan Bank Indonesia nomor 14/22/PBI/2012/ tanggal 21 Desember 2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bahwasanya bank umum diwajibkan menyalurkan danannya dalam bentuk pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa pasar minimal sebesar 20 % secara bertahap yang diikuti dengan penerapan insentif

Salah satu aspek yang sangat terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 yaitu aspek ekonomi. Wabah COVID-19 turut mempengaruhi perekonomian Negara-negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah COVID-19 sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan seperti kebangkrutan, PHK masal, dan pekerja yang dirumahkan dan beberapa UMKM yang terpaksa tutup karena adanya dampak ekonomi yang besar terhadap jalannya usaha sehingga dapat menyebabkan kesulitan keuangan di masyarakat dan menimbulkan banyaknya pengangguran. Dampak dari Covid-19 terhadap UMKM rata – rata mengalami penurunan omset yang lumayan besar. Hal ini terjadi karena berkurangnya aktivitas masyarakat diluar rumah, berkurangnya kepercayaan masyarakat

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM. Sesuai rilis Katadata Insight Center (KIC), mayoritas UMKM (82,9%) merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami pertumbuhan positif.

Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.

Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus Corona terhadap industri perekonomian, salah satunya industri perbankan. Perbankan memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan adanya virus corona dapat menyebabkan debitur memiliki peluang gagal bayar (probability of default) yaitu ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Bahkan di masa pandemi COVID-19, beberapa bank menahan diri untuk tidak memberikan pembiayaan ke calon nasabah dikarenakan banyaknya usaha calon nasabah yang tutup sehingga dapat berpengaruh terhadap pembiayaan.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah guna menekan dampak pandemi COVID-19 di bidang perbankan yaitu dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabah terdampak COVID-19 dan beberapa bantuan bagi UMKM yang terdampak adanya pandemi-19. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang berpotensi atau mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan ini dilakukan untuk memberi keringanan bagi debitur yang terdampak COVID-19, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya rasio pembiayaan bermasalah atau kredit macet di perbankan. Pada penelitian ini akan membahas pengaruh pendapatan dan aspek kebijakan pemerintah terhadap pembiayaan UMKM di masa pandemic covid-19 studi kasus UMKM di Belopa yang mengambil pembiayaan di Bank Syariah Cabang Belopa. Pada penelitian ini ditujukan pada kasus pandemi covid-19 gelombang pertama yaitu januari 2020 hingga Desember 2020 pada UMKM yang

mengambil pembiayaan di Bank Syariah di Cabang Belopa serta merasakan adanya beberapa kebijakan pemerintah dalam menunjang pembiayaan di masa pandemi covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah

1. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap pembiayaan pada usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemic covid-19 ?
2. Apakah aspek kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap pembiayaan pada usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemic covid-19 ?
3. Apakah pendapatan dan aspek kebijakan pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan pada usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemic covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah pendapatan berpengaruh terhadap pembiayaan pada usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemic covid-19
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah aspek kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap pembiayaan pada usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemic covid-19
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah pendapatan dan aspek kebijakan pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan pada usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemic covid-19

D. Manfaat penelitian

1. Bagi perusahaan

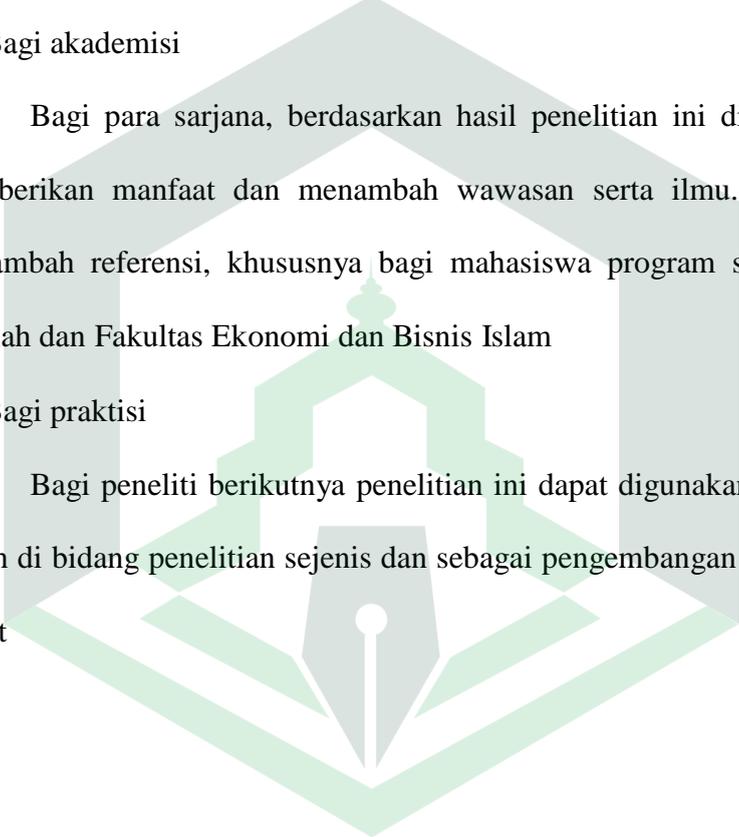
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para usaha mikro kecil dan menengah dan para kreditor baik Perbankan syariah maupun lembaga keuangan lainnya dalam menangani pembiayaan

2. Bagi akademisi

Bagi para sarjana, berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta ilmu. Semoga dapat menambah referensi, khususnya bagi mahasiswa program studi Perbankan Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

3. Bagi praktisi

Bagi peneliti berikutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut



IAIN PALOPO

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan di gunakan penulis sebagai sumber untuk mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. Wisnu Adi Hidayat dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kredit macet usaha mikro kecil dan menengah di sentra konveksi Ulujami Pemalang menunjukkan bahwa sebagian besar (75,9%) pengusaha konveksi di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang mendapatkan pendapatan dari residu usaha inti konveksi yaitu dari sisa-sisa hasil kain konveksi untuk menambah kewajiban kreditnya selain dari hasil penjualan konveksi, karena biaya transportasi naik dan mempengaruhi margin pendapatan dari hasil penjualan konveksi. Keadaan ini menggambarkan pengusaha tersebut dalam memenuhi kewajiban kreditnya tidak bergantung pada hasil penjualan konveksi semata, tetapi juga mencari alternatif dengan cara menjual sisa-sisa bahan konveksi. Sedangkan 24,1% pengusaha yang tidak melakukan mencari sumber lain selain dari hasil penjualan konveksi untuk memenuhi kewajibannya, karena sisa-sisa bahan konveksi volumenya sangat kecil, walaupun ada sisa tidak dijual dalam bentuk kain sisa, tetapi dijual dalam bentuk bahan jadi. Persamaan pada penelitian ini menggunakan variabel pendapatan dan kebijakan pemerintah perbedaannya terletak pada terdapat variabel independent.

2. Vina Natasya dan Pancawati Hardiningsih dalam penelitiannya yang berjudul Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan sosial berpengaruh terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19, insentif pajak juga berpengaruh terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19, dan perluasan modal kerja terbukti berpengaruh terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini memiliki Keterbatasan akses data karena adanya penolakan otorisasi di wilayah Semarang yang lain seperti Semarang Selatan, Semarang Timur, dan Semarang Utara. Adanya keterbatasan akses data menjadikan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk wilayah Semarang yang lain. Penolakan perijinan menjadikan jumlah periode amatan tidak dapat diperoleh lebih panjang hingga sampai akhir Desember. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya jumlah amatan penelitian menjadikan penilaian kurang efektif terhadap kebijakan tersebut. Terbatasnya jumlah pinjaman yang diberikan PT Pegadaian (Persero) pada UMKM sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum memperoleh modal kerja secara maksimal. Pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Presiden (BANPRES) hanya bisa diketahui jumlah pendaftar namun, tidak mendapatkan data nama penerima bantuan sehingga pihak Dinas UMKM tidak dapat melihat perkembangan penerima bantuan dan rentan terjadinya

miskomunikasi antara dinas dengan pelaku usaha. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan variabel kebijakan pemerintah di masa pandemi covid-19 dan menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan pada penelitian terdapat pada penelitian sebelumnya hanya fokus terhadap kebijakan pemerintah sedangkan penelitian yang saya lakukan terdapat variabel pendapatan.

3. Rina Destiana pada penelitiannya Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah Di Indonesia memiliki kesimpulan bahwa Permodalan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada bank syariah di Indonesia.

B. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Di Bank Syari'ah tidak ada kredit atau pinjaman berjangka tetap, hanya ada pembiayaan atau financing. Secara garis besar pengertian pembiayaan adalah dana yang dikeluarkan untuk menunjang investasi yang direncanakan, baik investasi tersebut dilakukan secara mandiri maupun oleh pihak lain. Menurut Undang Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa pengertian yang dimaksud pembiayaan adalah penyedia dana, yang didasarkan pada kesepakatan (agreement) yang dicapai antara bank dengan pihak lain. Serta pihak yang menerima atau

debitor akan mengembalikan uang atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu, dan adanya kompensasi atau dividen tambahan.¹

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk produk yang di berikan bank syariah untuk menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat menguntungkan bank, nasabah, dan pemerintah. Hal ini dikarenakan pembiayaan merupakan kegiatan yang memberikan return terbesar bagi bank syariah dibandingkan dengan kegiatan operasional lainnya. Pembiayaan adalah salah satu bentuk penyaluran dana atas dasar kepercayaan antara bank (penerbit dana) dengan nasabah (penerima dana). Bank berkeyakinan bahwa nasabah akan membayar dana setelah jangka waktu yang disepakati, dan bank akan memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang diperoleh dalam waktu tertentu, serta memberikan tambahan insentif atau bagi hasil sebagaimana disepakati dalam kontrak.² Pembiayaan menurut para ahli:

- 1) Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil³

¹ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011).106

² Ibid,105-106

³ Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 92.

- 2) Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit⁴
- 3) Pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

b. Pengertian Pembiayaan Dalam perspektif Islam

Bank sebagai lembaga intermediasi selain melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam system perbankan konvensional yang berbasis pada bunga sedangkan dalam syariah adalah yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki atau bagi hasil.

Menurut Muhammad Pembiayaan secara luas berarti pendanaan yang digunakan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁵

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

⁵ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2005), 304

lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil⁶

c. Analisis Pembiayaan

Sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan maka harus ada analisis untuk menentukan layak atau tidaknya suatu pembiayaan yang di realisasikan. Ada beberapa prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C (Caharacter, Colleteral, Capacity, Capital, dan Condition), analisis 7 P (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection) dan study kelayakan. Kedua prinsip ini 5C dan 7 P.

d. Landasan Al-Quran Tentang Pembiayaan

1) Dalam surat an-nisa ayat 29 berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ رَّاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

IAIN PALOPO
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (Pasal 1 ayat 12)

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.(Q.S An-nisaa’:29)⁷

2. Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1: Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro⁸. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Aufar(2014) : Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.

⁷ Departemen Agama, Mushaf Al Quran dan terjemah (Bogor:NUR no P.VI/1/TL.02.1/410/2009) h.88

⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp.10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam AUFAR (2014): Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menengah, merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d.Rp. 500.000.000) dan non manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp.600.000.000).

b. Kriteria dan Ciri-Ciri UMKM

Agar dapat membedakan UMKM diperlukan kriteria dan ciri-ciri tertentu dalam menggolongkan UMKM. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM, UMKM digolongkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kriteria usaha mikro Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6. “Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria usaha kecil Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling paling pajak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria usaha menengah Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling paling pajak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)⁹

⁹ Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6

Tabel 2.1 Jalur Pembiayaan Syariah untuk UMKM

No	Jalur	Target
1.	Perbankan Syariah (BUS, UUS dan BPRS)	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.	BMT atau Koperasi Syariah	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3.	BAZNAS dan LAZ	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4.	Program Pemerintah	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

c. Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Di negara maju, UMKM sangat penting tidak hanya karena karena kelompok usaha tersebut menyerap paling tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga di banyak negara kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar dibandingkan dengan kontribusi dari usaha besar.¹⁰

UMKM juga mampu memberikan masukan terhadap produk domestik bruto (PDB) paling besar di bandingkan jenis usaha besar. Misalnya di negara Indonesia pada tahun 2011 total PDB yan mampu di

¹⁰ Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 1.

sumbang oleh UMKM kurang lebih sekitar 65%, sedangkan usaha besar hanya menyumbang sekitar 50%.¹¹

Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting khususnya dalam perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta UMKM ini juga berperan dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Namun menurut Hemat penulis dalam buku UMKM di Indonesia berapapun ukurannya, mereka adalah pelaku usaha, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Para pelakunya dapat disebut sebagai wirausahawan. Mereka memiliki sejumlah sifat atau pembawaan sebagai seorang wirausahawan. Mereka mempunyai kemauan dan rasa percaya diri yang tinggi, mereka fokus kepada sasaran, mereka mau bekerja keras, mampu berinovasi¹²

3. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income, maka income dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar

¹¹ Ina Primiana, Potensi dan Tantangan UMKM Menghadapi Pasar Persaingan Global, (Seminar Nasional: 4 Desember 2013, diselenggarakan oleh fakultas syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Selanjutnya disebut Ina, Potensi dan Tantangan UMKM.

¹² Mulyadi Nitisusastro, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil (Jakarta:Alfabeta, 2009), 37

pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya)¹³. Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.¹⁴ Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan.¹⁵

Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.¹⁶

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 185

¹⁴ BN. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 230

¹⁵ Ibid

¹⁶ Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 47

bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.¹⁷

b. Sumber Pendapatan

Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pendapatan masyarakat terdiri dari¹⁸

- 1) Di sektor formal berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan
- 2) Di sektor informal berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti: penghasilan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain
- 3) Di sektor subsisten merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.

¹⁷ Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9.

¹⁸ Michell Rinda Nursandy, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha Tape di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso*, skripsi tidak diterbitkan.

Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan yang berupa uang maupun barang yang diterima, biasanya sebagai balas jasa dari sektor informal. Sumber pendapatan ini berupa:¹⁹

- 1) Pendapatan dari usaha, meliputi: hasil bersih dari hasil usaha sendiri, komisi dan penjualan
- 2) Pendapatan dari investasi
- 3) Pendapatan dari keuntungan sosial.

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih yang merupakan hasil yang diterima dari jumlah seluruh penerimaan setelah dikurangi pengeluaran biaya operasi. Sementara pendapatan diperoleh apabila terjadi transaksi antar pedagang dengan pembeli dalam satu kesepakatan bersama.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia pendapatan dapat timbul dari transaksi dan kejadian berikut ini

- 1) Penjualan barang

Barang meliputi barang yang diproduksi oleh entitas untuk dijual dan barang untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dari property lain yang dimiliki untuk dijual kembali.

- 2) Penjualan jasa

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas entitas yang telah disepakati secara kontraktual untuk dilaksanakan selama satu periode. Jasa tersebut dapat diserahkan dalam satu periode atau lebih dari

¹⁹ Rosy Pradipta Angga Purnama, Analisis Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Lama Usaha, dan Teknologi Proses Produksi terhadap Produksi Kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), jurnal ilmiah.

satu periode.

3) Penggunaan aset entitas oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk:

- a) Bunga yaitu pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terhutang kepada entitas.
- b) Rolyati yaitu pembebanan untuk penggunaan aset jangka panjang entitas. Dividen yaitu distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka atas kelompok modal tertentu.

c) Prinsip Pendapatan

Pendapatan atau upah dapat di definisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan prinsip ini terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 279

IAIN PALOPO

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya: Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu

bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).²⁰

pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dalam penciptaan barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan aktiva dan penurunan kewajiban.

menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- 2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- 3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi.

Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat

²⁰ Departemen Agama, Mushaf Al Quran dan terjemah (Bogor: NUR no P.VI/1/TL.02.1/410/2009) h.83.

tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi volume pendapatan dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

- (1) Kondisi dan kemampuan penjualan
- (2) Kondisi pasar
- (3) Modal
- (4) Kondisi operasional perusahaan

Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi²¹

- (1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- (2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- (3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

4. Kebijakan Pemerintah

a. Kebijakan

Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang²²

²¹ Boediono, Pengantar Ekonomi, Jakarta: Erlangga, (2012), hal. 150

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan”.²³

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan.

b. Penundaan angsuran pokok

Penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit; pengurangan tunggakan bunga kredit; pengurangan tunggakan pokok kredit; penambahan fasilitas kredit; dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit UMKM dilakukan melalui penundaan pokok dan subsidi. Kebijakan ini berlandaskan hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan

²² Safri Nugraha dkk, Hukum Administrasi Negara. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 93

²³ M. Hadjon Philip, Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik., Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). h. 152

program pemulihan ekonomi nasional yang selanjutnya diperbaharui dengan Nomor 85/PMK.05/2020.

c. Subsidi bunga UMKM

Pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha mikro dan kecil (kredit s/d. Rp500 juta) melalui BPR, perbankan, dan lembaga pembiayaan, maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan kedua. Penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha menengah juga diberikan pada usaha menengah (kredit Rp500 juta sampai Rp10 miliar) melalui BPR, perbankan, dan lembaga pembiayaan sebesar 3% selama 3 bulan

Pertama dan 2% selama 3 bulan kedua. Adapun kriteria UMKM yang dapat memperoleh subsidi bunga/margin, antara lain: (1) memiliki plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000; (2) memiliki sisa pokok (baki debet) kredit/pembiayaan sebelum masa pandemi Covid-19 (terdapat baki debet sampai dengan 29 Februari 2020); (3) tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional; (4) memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan (5) memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP

d. Insentif pajak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid 19, Maka peraturan ini merupakan perubahan atas PMK No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk wajib terdampak wabah virus Covid 19.

Selain memberikan insentif pajak berupa bebas PPh Final bagi UMKM, PMK No. 44/2020 ini juga memberikan perluasan sektor usaha penerima insentif diskon angsuran PPh 25, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembebasan PPh 22 Impor, dan perluasan penerima pembebasan PPh 21. Berdasarkan pada kebijakan ini, UMKM dapat mengajukan pembebasan pajak penghasilan final sebesar 0,5%, maka untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh UMKM tidak perlu lagi menyetor pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak lagi memotong atau memungut pajak kepada pelaku UMKM.

Kebijakan	Keterangan
Penundaan Angsuran Pokok dan Bunga UMKM UMi	<ul style="list-style-type: none"> • Penundaan cicilan pokok selama 6 bulan • Pembebasan bunga cicilan selama 3 bulan dan diskon 50% selama 3 bulan untuk nasabah KUR
Subsidi Bunga Kredit UMKM dan UMi	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit UMK sebesar 6% selama 3 bulan pertama, 3% selama 3 bulan kedua • Kredit Usaha Menengah sebesar 3% selama 3 bulan pertama, 2% selama 3 bulan kedua.
Insentif perpajakan bagi UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan/Penanggunan Tarif pajak 0,5% dalam PP 23/2018 • Insentif PPh Pasal 21 • Insentif pembebasan PPh Pasal 22 • Pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25 • Insentif restitusi PPN dipercepat hingga jumlah lebih bayar maksimal Rp5 miliar
Dana Insentif Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Stimulus untuk pemulihan ekonomi di daerah yang juga ditujukan untuk UMKM terdampak. • Dana bersumber dari cadangan bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN).
Stimulus modal kerja: Modal kerja darurat khusus bagi UMKM terdampak covid-19	<ul style="list-style-type: none"> • Stimulus bantuan modal kerja kepada UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan baik dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan. • Estimasi kebutuhan modal kerja UMKM dilihat dari outstanding kredit dan jumlah UMKM yang membutuhkan, sisi profil risiko kredit UMKM.
Penjaminan Modal Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah akan membayarkan premi penjaminan kredit bagi UMKM yang meminjam sampai dengan Rp10 miliar, dengan penjaminan kredit modal kerja sebesar Rp5 triliun. • Penjamin adalah PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
Penyertaan ke Bank Himbara	<ul style="list-style-type: none"> • Bernilai total Rp30 Triliun untuk empat bank Himbara • Diarahkan untuk fokus ke UMKM • Bunga ditetapkan 80% dari 7 Day BI Repo Rate
Banpres Produktif	<ul style="list-style-type: none"> • Banpres produktif merupakan bantuan tunai dari pemerintah untuk usaha mikro dan kecil. • Dianggarkan sebesar Rp28,8 Triliun • Calon penerima ditargetkan mencapai 12 juta UMK

Gambar 2.1 Kebijakan Pemerintah Sektor UMKM Masa Pandemi

Sumber : kementerian Koordinat Bidang Perekonomi Republik Indonesia

Pemerintah melalui berbagai elemen seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN juga Institusi Keuangan, baik bank maupun nonbank, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UMKM agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian Nasional yang kukuh.

Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan

e. Implementasi kebijakan

Implementasi Kebijakan Makna dari implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan bijaksana (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu ; adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan, adanya unsur pelaksana (implomenter) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut

. Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu Rangkaian 35 tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusanrumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

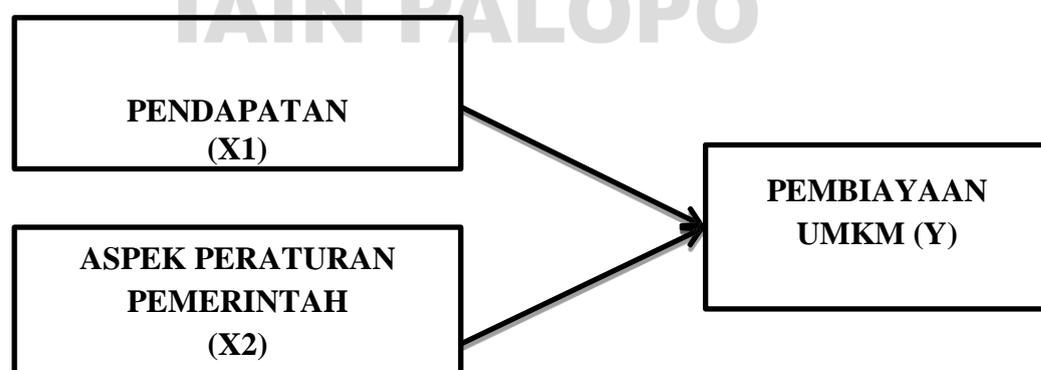
Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Perlu dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat

dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chif J. O, dengan mengatakan bahwa, hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret, keluaran atau outcome yang biasanya terwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga, manfaat atau benefit yang wujud beragam, dampak atau impact baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok.

Pemerintah di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi Negara telah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti garis-garis kebijaksanaan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, surat edaran, instruksi-instruksi, peraturan-peraturan menteri, keputusan-keputusan, dan pengumuman-pengumuman.

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel bebas yaitu aspek keuangan (X1) dan aspek kebijakan pemerintah (X2) dan terdapat pula variabel terikat yaitu



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

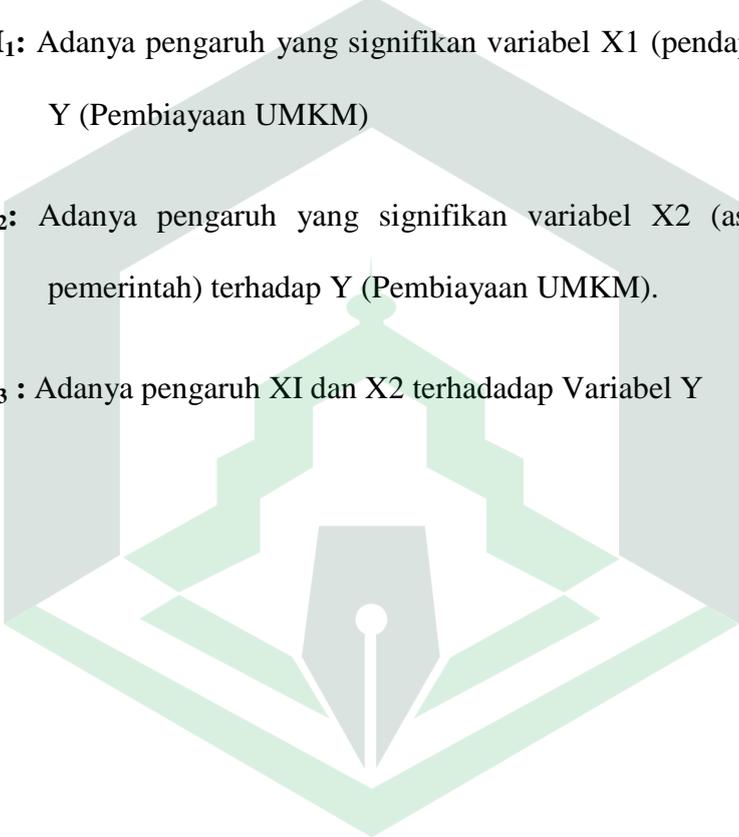
D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.²⁴ Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Adanya pengaruh yang signifikan variabel X1 (pendapatan) terhadap Y (Pembiayaan UMKM)

H₂: Adanya pengaruh yang signifikan variabel X2 (aspek kebijakan pemerintah) terhadap Y (Pembiayaan UMKM).

H₃ : Adanya pengaruh X1 dan X2 terhadap Variabel Y



IAIN PALOPO

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009). 64

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana dalam metode ini menguji kolerasi pengaruh antara variable dengan variabel lainnya. Desain penelitian yang menggunakan penelitian kuantitatif harus terstruktur, terstandarisasi, diformalkan dan dirancang terlebih dahulu. Rancangannya spesifik dan detail karena yang menjadi dasar adalah rancangan penelitian yang akan dilaksanakan²⁵. Penelitian kuantitatif digunakan penulis, untuk mengetahui tentang pengaruh pendapatan dan aspek kebijakan pemerintah terhadap pembiayaan UMKM di masa pandemic covid-19 yang mengambil pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Cabang Belopa.

B. Lokasi dan waktu

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Karena penelitian menggunakan metode kuesioner maka lokasi pada penelitian ini berada di Kecamatan Belopa

2. Waktu

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama empat bulan, yaitu mulai bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021.

²⁵ Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras), 99

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah unit analisis rasional yang bisa diasumsikan salah satu dari sejumlah kumpulan nilai yang ditentukan. Atau Variabel bisa sebagai Sebuah konsep yang dapat diukur salah satu dari empat jenis skala pengukuran, yang memiliki tingkat presisi yang berbeda-beda pengukuran

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel yang tidak dapat diukur (diamati) yaitu pembiayaan dan variabel yang diukur yaitu faktor internal dan external dalam hal ini pendapatan dan kebijakan pemerintah. Pada penelitian ini mengambil responden dari nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan di Bank Syariah Indonesia cabang Belopa.

1. Variabel Dependent

Variabel dependent adalah hasil atau perubahan yang diakibatkan oleh pengenalan independen variabel. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan UMKM.

2. Variabel Independent

Variabel independent adalah penyebab yang seharusnya bertanggung jawab untuk membawa perubahan dalam fenomena atau situasi tertentu. Sehingga variabel independen dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendapatan dan aspek kebijakan pemerintah

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Pengertian	Indikator
Pendapatan	Pendapatan adalah hasil kerja usaha atau sebagainya	Penghasilan yang di terima perbulan
Kebijakan pemerintah	Kebijakan pemerintah adalah Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu	Efektifitas dampak kebijakan
pembiayaan	pembiayaan adalah penyedia dana, yang didasarkan pada kesepakatan (agreement) yang dicapai antara bank dengan pihak lain. Dalam hal ini pembiayaan KUR	Jenis Usaha Skala usaha

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek atau subjek yang memiliki jumlah serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya²⁶. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 30 pedangan UMKM yang mengabil pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Cabang Belopa.

2. Sampel

²⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Media Publishing,2015).55

Sampel adalah bagian dari anggota suatu populasi yang diambil berdasarkan jumlah serta karakteristik tertentu dengan prosedur tertentu²⁷. Sampel adalah subkelompok dari suatu populasi yang akan diteliti, oleh karena itu suatu Sample harus mewakili dan juga memberikan gambaran yang benar tentang populasi²⁸.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik Purposive Sampling atau judgmental sampling yang digunakan dengan menentukan karakteristik tertentu terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli²⁹. Sample yang di gunakan dalam penelitian ini adalah UMKM di yang berada di sekitaran Belopa yang mengambil pembiayaan di atas Rp5.000.000,00 pada Bank Syariah Cabang Belopa.

E. Sumber Data

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yang akan di gunakan untuk analisis dan pembahasan masalah. Dalam penelitian ini data primer bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada UMKM di sekitaran kecamatan Belopa yang mengambil pembiayaan di bank syariah Indonesia Cabang Belopa.

F. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan

²⁷ *Ibid.*, 56

²⁸ Gulo, W., *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002). 56.

²⁹ Bambang P dan Lina MJ, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 135

langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (W. Gulo, 2002: 116).

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Meleong, 2010: 186). Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti

3. Kuesioner

Kuesioner di buat dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang di susun sedemikian rupa sehingga membentuk jawaban terarah (*direct response*) untuk di ajukan kepada responden mengenai pengaruh aspek keuangan dan kebijakan pemerintah terhadap pembiayaan bermasalah UMKM di masa Pandemic covid-19.

Pertanyaan yang di ajukan menggunakan metode *multiple choice*, tipe Linkert. Kuesioner ini di tujukan kepada UMKM yang berada di pelataran simpurusiang yang mengambil pembiayaan di bank syariah.

Alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan dalam lembar kuesioner peneliti menggunakan skala likert. Metode ini menggunakan skala yang bergerak dari 1 sampai 5 untuk setiap alternative jawaban yang mempunyai skor masing-masing

Tabel 3.2 Poin Penilaian

Alternatif Jawaban	KETERANGAN		Nilai
	Aspek Keuangan	Aspek Kebijakan Pemerintah	
SS	Sangat Setuju		5
S	Setuju		4
N	Netral		3
TS	Tidak Setuju		2
STS	Sangat Tidak Setuju		1

4. Dokumentasi

Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Lexy J. Moleong, 2010: 217). Adanya dokumentasi untuk mendukung data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses di mana peneliti membawa struktur dan makna ke kumpulan data yang dikumpulkan. data kualitatif dan kuantitatif memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan metode analisis yang berbeda pula. Data kualitatif didasarkan pada makna yang diungkapkan di mana data yang dikumpulkan biasanya tidak terstandarisasi sehingga memerlukan klasifikasi ke dalam kategori dan analisis dilakukan melalui penggunaan konseptualisasi.

Di sisi lain, data kuantitatif didasarkan pada makna yang diperoleh di mana data yang dikumpulkan adalah numerik dan standar dan analisis dilakukan melalui

penggunaan diagram dan statistik. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menganalisis data, analisis regresi linear berganda adalah regresi yang dimana satu variabel terikat (Y) akan dihubungkan atau dijelaskan oleh dua atau lebih variabel bebas (X1 dan X2). Serta dalam membantu penelitian ini dalam menganalisis data, penulis menggunakan program SPSS for Windows version 25.0 sebagai alat analisisnya.

1. Uji Validitas

Validitas menurut Sugiyono (2016) menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika koefisien antara item dengan total item sama atau diatas 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid, tetapi jika nilai korelasinya dibawah 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

Syarat minimum untuk dianggap suatu butir instrument valid adalah nilai indeks valid adalah nilai indeks validitasnya $\geq 0,3$ (Sugiyono, 2016). Oleh karena itu, semua pernyataan yang memiliki tingkat korelasi dibawah 0,3 harus diperbaiki karena dianggap tidak valid.

2. Uji realibilitas

Realianilitas kuesioner dalam penelitian digunakan metode split half item tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok item ganjil dan kelompok item genap. Kemudian masing-masing kelompok skor tiap itemnya dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total. Apabila korelasi 0,7 maka

dikatakan item tersebut memberikan tingkat reliabel yang cukup, sebaliknya apabila nilai korelasi dibawah 0,7 maka dikatakan item tersebut kurang reliabel. Adapun rumus untuk mencari reliabelitas adalah sebagai berikut.

$$r = \frac{n(\Sigma AB) - (\Sigma A)(\Sigma B)}{\sqrt{((n\Sigma A^2) - (\Sigma A)^2)(n(\Sigma B^2) - (\Sigma B)^2)}}$$

Dimana :

r = koefisien korelasi

n = banyaknya responden

A = skor item pertanyaan ganjil

B = skor pertanyaan genap

Setelah koefisien korelasi diketahui, aka selanjutnya hasil tersebut dimasukan kedalam rumus Spearman Brown dengan rumus sebagai berikut.

$$r = \frac{2rb}{1 + rb}$$

Dimana :

r = nilai reliabilitas

rb = korelasi produk moent antara belahan pertama (ganjil) dan belahan kedua (genap).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak.³⁰Pada uji t dan F mengasumsikan

³⁰ Singgih Santoso, *Buku Latihan SPSS Statistika Parametrik*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), 212

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen, karena akan menurunkan kepercayaan terhadap uji signifikansi. Deteksi ada tidaknya gejala polikolonial pada model regresi ini dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).³¹

c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan variabel pada residual dari satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya konstan, itu disebut kesalahan kuadrat rata-rata, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Ini tidak terjadi dengan model regresi yang baik. Lakukan uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dengan melihat scatter plot.³²

4. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh aspek keuangan (X1) Dan aspek kebijakan pemerintah (X2) Terhadap pembiayaan bermasalah UMKM (Y)

³¹ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009). 79

³² Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009). 80

Sehingga persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan

Y = Variabel dependent (Pembiayaan UMKM)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

X1 = Variabel independent (pendapatan)

X2 = Variabel independent (aspek kebijakan pemerintah)

5. Uji hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji t (secara parsial) dan uji F (simultan).

a) Uji t (Pengujian Secara Parsial)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara parsial (individu) terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan. Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah nilai T tabel dapat dilihat signifikansi 0,05. Atau jika nilai t hitung > t tabel.³³

b) Uji F (Pengujian Secara Simultan)

³³ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* Cetakan Ke-7, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013). 61

Untuk melihat gambaran apakah semua variabel bebas yang ada di dalam model berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka dilakukan Uji F. Serta Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan tingkat nilai signifikansi dengan nilai $\alpha = 0,05$. Dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara nilai signifikansi dengan nilai $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan sebagai berikut :³⁴

(1) Jika nilai Sig > α maka Ho diterima

(2) Jika nilai Sig < α maka Ha diterima

c) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Selain itu Koefisien Determinasi menunjukkan variasi naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Nilai koefisien determinasi adalah antara satu dan nol. Apabila nilai koefisien determinasi mendekati angka satu berarti variabel independen dapat menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan sebaliknya apabila nilainya kecil atau mendekati nol berarti variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

³⁴ *Ibid*,62

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

Belopa adalah ibu kota baru Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Nama Belopa ini termasuk dikenal pada tahun 1960-an. Sebelumnya desa Belopa ini dikenal dengan nama La Belopa, yang bahasa daerah setempat berarti "pelepah sagu" atau "gaba-gaba". Belopa resmi menjadi ibu kota Kabupaten Luwu sejak 13 Februari 2006 diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Amien Syam. Kabupaten Luwu menjadikan kota Belopa selaku ibu kota, setelah memindahkan ibu kota dari Palopo, karena Palopo menjadi kota otonomi, hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu, sehingga Kabupaten Luwu harus memindahkan ibu kota ke sebelah selatan, sekitar 50 km dari kota Palopo. Belopa terletak di pinggir jalan raya Trans-Sulawesi, suatu kecamatan yang terletak di antara kota Palopo dan kota Makassar.

Pada bab ini akan di bahas lhasil penelitian yang dilakukan setelah permasalahan diidentifikasi dan telah melalui degala tahap-tahap pengolahan data untuk menciptakan suatu model permasalahan untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini objek yang dijadikan penelitian adalah nasabah UMKM yang mempunyai pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Belopa. Di dalam penelitian ini terdapat 30 responden dari 30 populasi nasabah yang mempunyai pembiayaan di BSI belopa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

Pengaruh Pendapatan dan aspek kebijakan pemerintah terhadap pebiayaan UMKM di masa pandemic covid-19 (studi kasus UMKM di belopa)

B. Karakter Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, posisi pekerjaan, lama bekerja, pendidikan terakhir, dan pendapatan/bulan. Peneliti telah merangkum karakteristik responden secara terperinci yang ditunjukkan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	17	56,6%
Perempuan	13	43,33%

Tabel 4.2 Jumlah Responden Berdasarkan Umur

Usia	Jumlah	Presentasi
20-25 tahun	8	26,6%
26-31 tahun	14	46,6%
32-37 tahun	5	16,66%
Diatas 37 tahun	3	10%

Tabel 4.3 Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentasi
SD	2	6,6%
SMP	6	20%
SMA	14	46,6%
S1	8	26,6%
Lainnya	0	0

Tabel 4.4 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Presentase
Makanan	16	53,33%
Minuman	10	33,3%
Jasa	4	13,3%

C. Hasil Penelitian

1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Validitas suatu instrumen akan menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur untuk mengukur objek yang diukur. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara r -hitung (*product moment*) dengan r -tabel. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan valid:

- 1) Apabila r -hitung $>$ r -tabel (pada taraf $\alpha = 5\%$), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.
- 2) Apabila r -hitung $<$ r -tabel (pada taraf $\alpha = 5\%$), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Pendapatan (X1)

Item Soal	r -hitung	Tingkat Signifikan	Keterangan
-----------	-------------	--------------------	------------

X1.1	0,542 > 0,361	0,05	Valid
X1.2	0,449 > 0,361	0,05	Valid
X1.3	0,716 > 0,361	0,05	Valid
X1.4	0,576 > 0,361	0,05	Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel tersebut hasil uji validitas variabel pendapatan (X1) dapat diketahui bahwa r-tabel dengan df (Alpha, n-2) atau (30-2 = 28) dan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 arah adalah 0,361. Maka masing-masing item soal dapat dinyatakan valid karena nilai r-hitung >r-tabel.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas kebijakan pemerintah (X2)

Item Soal	r-hitung	Tingkat Signifikan	Keterangan
X2.1	0,396 > 0,361	0,05	Valid
X2.2	0,553 > 0,361	0,05	Valid
X2.3	0,253 > 0,361	0,05	Valid
X2.4	0,624 > 0,361	0,05	Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji validitas variabel aspek kebijakan pemerintah (X2) dapat diketahui bahwa r-tabel dengan df (Alpha, n-2) atau (30-2 = 28) dan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 arah adalah 0,361. Maka masing-masing item soal dapat dinyatakan valid karena nilai r-hitung >r-tabel.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Pembiayaan (Y)

Item	r-hitung	Tingkat	Keterangan
------	----------	---------	------------

Soal		Signifikan	
Y.1	0,904 > 0,361	0,05	Valid
Y.2	0,853 > 0,361	0,05	Valid
Y.3	0,844 > 0,361	0,05	Valid
Y.4	0,636 > 0,361	0,05	Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji validitas variabel pembiayaan (Y) dapat diketahui bahwa r-tabel dengan df (Alpha, n-2) atau (30-2 = 28) dan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 arah adalah 0,361. Maka masing-masing item soal dapat dinyatakan valid karena nilai r-hitung > r-tabel.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menggambarkan pada kemantapan dan kejelasan alat ukur yang digunakan. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas atau kejelasan yang tinggi atau dapat dipercaya, apabila alat ukur tersebut stabil (*ajeg*) sehingga dapat diandalkan (*dependability*) dan dapat digunakan untuk meramalkan (*predictability*).

Kriteria reliabiliti suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,06. Uji reliabiliti dari instrumen penelitian dengan tingkat signifikan (α) = 5%

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1, X2,dan Y

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Pendapatan (X1)	0,628	Reliabel
Kebijakan Pemerintah (X2)	0,602	Reliabel
Pembiayaan (Y)	0,801	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah

Dari tabel 4.4 hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa setiap variabel dapat dikatakan reliabel karena *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel terkait, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat menggunakan uji Kolmogrof-Smirnov. Kriteria pengambilan keputusan dengan pendekatan Kolmogrof-Smirnov adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai sig. $\geq 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.
- 2) Apabila nilai sig. $\leq 0,05$ maka H_0 diterima, artinya data yang digunakan dalam penelitian tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,17608182

Most Extreme Differences	Absolute	,068
	Positive	,068
	Negative	-,065
Test Statistic		,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 4.8 hasil uji normalitas dapat diketahui berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan nilai (Asymp.Sig.2-tailed) pada variabel pendapatan, kebijakan pemerintah dan pembiayaan lebih besar dari 0,05 yaitu $0,200 > 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas (independen) yang lainnya. Dasar pengambilan keputusan adalah :

- 1) Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance $> 0,1$ maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas.
- 2) Jika nilai VIF > 10 dan Tolerance $< 0,1$ maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi terdapat masalah multikolinieritas.

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,552	2,832		3,020	,005		
	Pendapatan(X1)	,490	,217	,380	2,260	,032	,982	1,018
	Kebijakan pemerintah (X2)	-,378	,226	-,281	-1,670	,106	,982	1,018

a. Dependent Variable: Y

Data Primer Diolah

Pada Tabel hasil uji multikolinieritas SPSS di atas menunjukkan bahwa variabel pendapatan (X1) memperoleh nilai VIF 1,018 dan variabel kebijakan pemerintah (X2) memperoleh nilai VIF 1,018. Hasil VIF ketiga variabel tersebut lebih kecil dari 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini terbebas dari adanya multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk menguji heteroskedastisitas, dalam penelitian ini digunakan uji Glejser dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolute residualnya. Dengan ketentuan:

- 1) Apabila koefisien signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

- 2) Apabila koefisien signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti terjadi adanya heterokedastisitas.

Tabel 4.11 Hasil Uji Heterokedastisitas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	
1	(Constant)	1,910	1,461		1,308	,202	
	Pendapatan (X1)	-,169	,112	-,270	-1,513	,142	,982
	Kebijakan pemerintah (X2)	,170	,117	,259	1,454	,157	,982

a. Dependent Variable: RES2
Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas SPSS di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pendapatan (X1) sebesar 0,142 dan variabel kebijakan pemerintah (X2) sebesar 0,157. Dari masing-masing variabel mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	8,552	2,832		3,020	,005
	Pendapatan (X1)	,490	,217	,380	2,260	,032
	Kebijakan Pemerintah (X2)	-,378	,226	-,281	-1,670	,106

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut :

$$Y = 8,552 + 0,490X1 - 0,378X2 + e$$

Dari persamaan regresi diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 8,552 menunjukkan nilai pembiayaan UMKM sebelum dipengaruhi oleh variabel pendapatan dan kebijakan pemerintah
- Nilai koefisien regresi pada variabel pendapatan (X1) sebesar 0,490 adalah positif. Artinya jika terjadi peningkatan pendapatan sebesar 1% , maka penyaluran pembiayaan UMKM akan bertambah 0,490%, dimana faktor-faktor lain dianggap konstan.
- Nilai koefisien regresi pada variabel kebijakan pemerintah (X2) sebesar -0,378 adalah negatif. Artinya jika terjadi peningkatan kebijakan pemerintah sebesar 1%, maka penyaluran pembiayaan

UMKM menurun sebesar -0,378, dimana faktor-faktor lain dianggap konstan.

3. Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% (0,05) dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan probabilitas (nilai signifikan) < tingkat signifikansi 5% ($=0,05$) maka H_a diterima dan H_o ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan probabilitas (nilai signifikan) > tingkat signifikansi 5% ($=0,05$) maka H_o diterima dan H_a ditolak berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.13. Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	8,552	2,832		3,020	,005
Pendapatan (X1)	,490	,217	,380	2,260	,032
Kebijakan pemerintah (X2)	-,378	,226	-,281	-1,670	,106

a. Dependent Variable: Pembiayaan (Y)

Nilai t tabel dengan signifikansi $0,1 : 2 = 0,05$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n - k$ atau $30 - 2 = 28$. Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,05), maka hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,048.

Berdasarkan tabel 4.12 diatas hasil uji t menunjukkan bahwa:

- 1) Nilai koefisien regresi dari pendapatan menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $(2,260) > t_{tabel}$ sebesar $(2,048)$ dan nilai sig. sebesar $(0,032) < (0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pendapatan terhadap pembiayaan UMKM di bank syariah sehingga H1 yang menyatakan diduga pendapatan berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan di bank syariah diterima.
- 2) Nilai koefisien regresi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $(-1,670) < t_{tabel}$ sebesar $(2,048)$ dan nilai sig. sebesar $(0,106) > (0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif namun tidak signifikan antara kebijakan pemerintah terhadap penyaluran pembiayaan di bank syariah sehingga H2 yang menyatakan diduga kebijakan pemerintah berpengaruh negatif terhadap pembiayaan di bank syariah ditolak.

b. Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan

menggunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, dan probabilitas signifikan > 0.05 , H_0 diterima dan H_1 ditolak
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, dan probabilitas signifikan < 0.05 , H_0 ditolak dan H_1 diterima

Tabel 4.14 Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	46,142	2	23,071	4,536	,020 ^b
	Residual	137,325	27	5,086		
	Total	183,467	29			

a. Dependent Variable: Pembiayaan (Y)

b. Predictors: (Constant), Kebijakan pemerintah (X2), Pendapatan (X1)

Berdasarkan tabel di atas, nilai F_{hitung} sebesar 4,536 dengan nilai signifikansi 0.020 dan nilai F_{tabel} adalah 3.34. Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $4,536 > 3,34$ dan nilai signifikansi < 0.05 atau $0,020 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel pendapatan dan kebijakan pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM di bank syariah.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi adalah analisis untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,501 ^a	,252	,196	2,255

a. Predictors: (Constant), Kebijakan pemerintah (X2), Pendapatan (X1)

b. Dependent Variable: Pembiayaan (Y)

Sumber : Data Pimer Diolah

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi tersebut dapat diketahui bahwa R Square (R^2) sebesar 0,252 atau 25,2% yang menunjukkan bahwa variabel pembiayaan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan dan kebijakan pemerintah sebesar 25,2. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

D. Pembahasan

Semakin berkembangnya suatu perekonomian atau perkembangan usaha dari suatu perusahaan maka perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Salah satu bentuk sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan adalah pembiayaan. Namun sektor pembiayaan UMKM memiliki resiko yang besar

karena suatu usaha tidak ada yang memastikan apakah akan mendapat keuntungan atau justru akan mengalami kerugian. penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang memiliki populasi dan sampel sebanyak 30 UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Belopa yang mengambil pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia Cabang Belopa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan dan kebijakan pemerintah terhadap pembiayaan UMKM di masa Pandemic covid-19.

1. Pengaruh pendapatan terhadap pembiayaan UMKM di masa Pandemic covid-19

Hasil pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa variabel pendapatan secara signifikan mempengaruhi pembiayaan UMKM pada nasabah BSI KUR mikro cabang Belopa. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yakni nilai sig. sebesar $(0,032) < (0,05)$ dan nilai t_{hitung} sebesar $(2,260) > t_{tabel}$ sebesar $(2,048)$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pendapatan terhadap pembiayaan UMKM di bank syariah artinya apabila pendapatan UMKM makin tinggi maka semakin kuat pengaruhnya terhadap pembiayaan.

Penelitian ini didukung oleh teori Kasmir tentang prinsip pembiayaan di dasarkan pada 5C salah satunya yaitu *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.³⁵ Dalam hal ini semakin tinggi pendapatan maka

³⁵Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.106-107

semakin besar kemungkinan nasabah mengembalikan pinjaman yang di ambil.

Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wisnu Adi Hidayat dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kredit macet usaha mikro kecil dan menengah di sentra konveksi Ulujami Pemalang menunjukkan bahwa sebagian besar (75,9%) pengusaha konveksi di Sentra Konveksi Ulujami Pemalang mendapatkan pendapatan dari residu usaha inti konveksi yaitu dari sisa-sisa hasil kain konveksi untuk menambah kewajiban kreditnya selain dari hasil penjualan konveksi. Keadaan ini menggambarkan pengusaha tersebut dalam memenuhi kewajiban kreditnya menggunakan pendapatan konveksi.

2. Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pembiayaan UMKM di masa Pandemic covid-19

Dari hasil uji hipotesis mengungkapkan bahwa variabel kebijakan pemerintah Nilai koefisien regresi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $(-1,670) < t_{tabel}$ sebesar $(2,048)$ dan nilai sig. sebesar $(0,106) > (0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif namun tidak signifikan antara kebijakan pemerintah terhadap penyaluran pembiayaan di bank syariah hal ini dikarenakan beberapa responden beranggapan bahwa ada beberapa kebijakan pemerintah yang berpengaruh negatif terhadap pembiayaan misalnya Bantuan Presiden (Banpres) yang tidak merata karena tidak semua UMKM mendapatkannya, tapi tidak semua kebijakan sehingga hasilnya negatif namun tidak signifikan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Vina Natasya dan Pancawati Hardiningsih dalam penelitiannya yang berjudul Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi Artinya pemberian bantuan sosial Nilai koefisien regresi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $(2,250) > t_{tabel}$ sebesar $(1,968)$ dan nilai sig sebesar $(0,014) < (0,05)$ hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara bansos terhadap pengembangan UMKM di masa Pandemic, insentif pajak Nilai koefisien regresi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $(8,890) > t_{tabel}$ sebesar $(1,968)$ dengan nilai sig. $(0,000) < (0,05)$ hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara insentif pajak terhadap pengembangan UMKM di masa pandemic, dan perluasan modal kerja Nilai koefisien regresi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $(2,296) > t_{tabel}$ sebesar $(1,968)$ dengan nilai sig. $(0,005) < (0,05)$ artinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM pada masa pandemi Covid-19.

3. Pengaruh secara simultan pendapatan dan aspek kebijakan pemerintah terhadap pembiayaan pada usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemic covid-19.

Hasil pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa variabel pendapatan dan kebijakan pemerintah yaitu nilai F_{hitung} sebesar 4,536 dengan nilai signifikansi 0.020 dan nilai F_{tabel} adalah 3.34. Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $4,536 > 3,34$ dan nilai signifikansi < 0.05 atau $0,020 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel pendapatan

dan kebijakan pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia Cabang Belopa. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang ada di dalam model berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.



IAIN PALOPO

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa

1. Hasil pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa variabel pendapatan secara signifikan mempengaruhi pembiayaan UMKM pada nasabah BSI KUR mikro cabang Belopa. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yakni nilai sig. sebesar $(0,032) < (0,05)$ dan nilai t_{hitung} sebesar $(2,260) > t_{tabel}$ sebesar $(2,048)$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pendapatan terhadap pembiayaan UMKM di bank syariah artinya apabila pendapatan UMKM makin tinggi maka semakin kuat pengaruhnya terhadap pembiayaan.
2. Dari hasil uji hipotesis mengungkapkan bahwa variabel kebijakan pemerintah Nilai koefisien regresi menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $(-1,670) < t_{tabel}$ sebesar $(2,048)$ dan nilai sig. sebesar $(0,106) > (0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif namun tidak signifikan antara kebijakan pemerintah terhadap penyaluran pembiayaan di bank syariah hal ini dikarenakan beberapa responden beranggapan bahwa ada beberapa kebijakan pemerintah yang berpengaruh negatif terhadap pembiayaan misalnya Bantuan Presiden (Banpres) yang tidak merata karena tidak semua UMKM mendapatkannya, tapi tidak semua kebijakan sehingga hasilnya negatif namun tidak signifikan

3. Hasil pengujian hipotesis mengungkapkan bahwa variabel pendapatan dan kebijakan pemerintah yaitu nilai F_{hitung} sebesar 4,536 dengan nilai signifikansi 0.020 dan nilai F_{tabel} adalah 3.34. Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $4,536 > 3,34$ dan nilai signifikansi < 0.05 atau $0,020 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel pendapatan dan kebijakan pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM di Bank Syariah Indonesia Cabang Belopa

B. Saran

Dari uraian yang telah saya paparkan sebagai penulis, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan beberapa saran sebagai bahan masukan Untuk peneliti Selanjutnya perlu memperluas wilayah penelitian khususnya bagi UMKM di wilayah lain yang terdampak pandemic covid-19

1. Dan untuk para UMKM di wilayah kota Belopa dapat memaksimalkan pendapatan untuk meminimalisir Pembiayaan bermasalah
2. Untuk Bank Syariah Indonesia Penelitian ini dapat di gunakan sebagai dasar agar dapat potensi timbulnya pembiayaan bermasalah di masa pandemic covid-19

DAFTAR PUSTAKA

- Sujianto, Agus Eko. *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar metode penelitian*. (2009).
- Bambang P dan Lina MJ, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- BN. Marbun. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Departemen Agama, *Mushaf Al Quran dan terjemah*. Bogor: NUR no P.VI/1/TL.02.1/410/2009
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Media Publishing, 2015.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Gulo, W., *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Ghazali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* Cetakan Ke-7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Danil, Mahyu. "Pengaruh pendapatan terhadap tingkat konsumsi pada pegawai negeri sipil di kantor bupati kabupaten Bireuen." *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh* 4.7 (2013)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* . Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.

- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta:Alfabeta, 2009.
- Mutamimah. "Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syari'ah di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, vol. 19, no. 1, (Maret 2012).
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/1692>
- Purnama, Rosy Pradipta Angga. Analisis Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Lama Usaha Dan Teknologi Proses Produksi Terhadap Produksi Kerajinan Kendang Jimbe Di Kota Blitar. Diss. Universitas Brawijaya, 2013.
- Sukirno, Sadono. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Santoso, Singgih. *Buku Latihan SPSS Statistika Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Tambunan, Tulus T.H. *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009



IAIN PALOPO

L

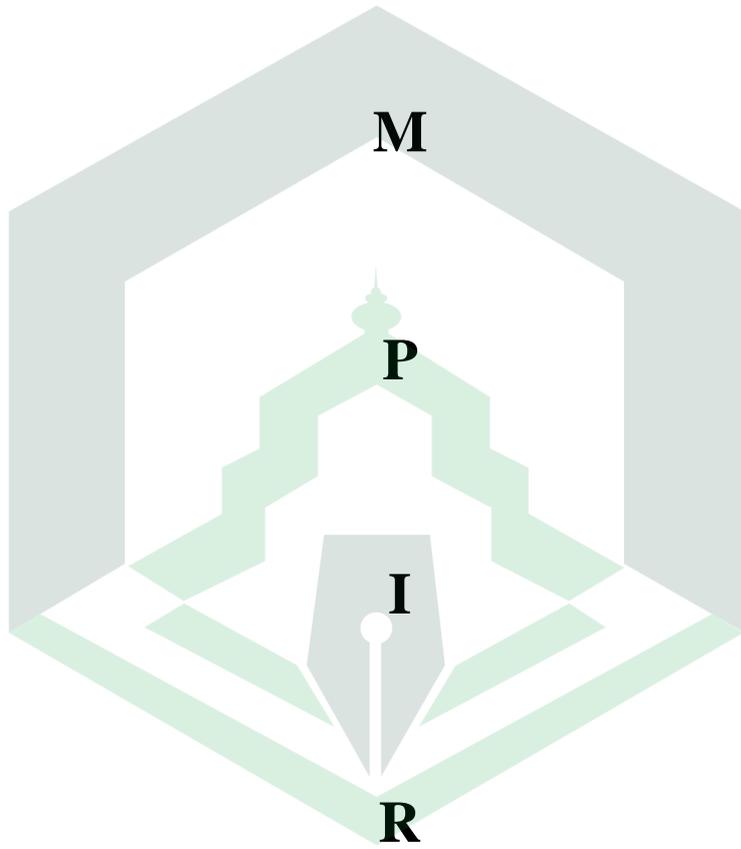
A

M

P

I

R



IAIN PALOPO

A

N

KUISIONER PENELITIAN

PENGARUH PENDAPATAN DAN ASPEK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh : NIRMAYASARI

A. Identitas Umum Responden

Nama :

Jenis kelamin :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Jenis Usaha :



IAIN PALOPO

1. Sejak kapan anda mulai menjadi nasabah kredit/pembiayaan ?

Jawab :

2. Hal apakah yang mendorong anda melakukan pinjaman ?

Jawab :

3. Berapa jumlah pinjaman yang anda pinjam ?

Jawab : Rp

4. Jangka waktu pinjaman yang diberikan tergolong lama sehingga meringankan pembayaran cicilan saya?

Jawab:

5. Berapa jumlah karyawan bapak/ibu?

Jawab :

6. Berapa asset yang dimiliki bapak/ibu dari usaha tersebut?

Jawab:

7. Berapa cabang usaha yang bapak/ibu miliki sampai saat ini?

Jawab:

8. Bagaimana status kios yang bapak/ibu tempati? (hak milik/kontrak)

Jawab:

9. Apakah kredit/pembiayaan benar-benar disalurkan untuk peningkatan modal usaha atau digunakan untuk keperluan lain? (Apa keperluannya)

Jawab :

10. Apa setelah bapak/ibu mengajukan pinjaman, pendapatan bapak/ibu semakin meningkat? Berapa presentase peningkatan?

Jawab:

11. Berapa jumlah peningkatan pendapatannya setelah menerima kredit/pembiayaan?

Jawab:

12. Apakah setelah mengajukan pinjaman bapak/ibu bisa membangun cabang baru?

Jawab:

PETUNJUK PENGISIAN

Ada 5 (Lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pertanyaan, yaitu :

- a. Sangat Setuju (SS)
- b. Setuju (S)
- c. Netral (N)
- d. Tidak Setuju (TS)
- e. Sangat Tidak Setuju (STS)

1. Pendapatan (X1)

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Selama pandemi covid-19 pendapatan omset penjualan dari usaha dagang anda meningkat setiap Bulannya					
2.	Selama pandemi covid-19 pendapatan usaha cukup untuk kehidupan sehari-hari					
3.	Pendapatan pada masa pandemi covid-19 lebih besar di banding sebelum pandemi					
4.	Selama pandemi covid-19 laba usaha yang anda dapatkn tergolong besar					

IAIN PALOPO

2. Kebijakan Pemerintah (X2)

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Kebijakan pemerintah mengenai restrukturisasi pembiayaan berpengaruh positif terhadap usaha					
2.	UMKM terbantu dengan adanya kebijakan pemerintah di sektor UMKM dimasa pandemi covid					
3.	Dengan adanya kebijakan pemerintah di sektor UMKM di masa pandemi meringankan pembiayaan anda di bank syariah					
4.	Dengan adanya bantuan presiden bagi UMKM kurang cukup sehingga harus mengambil pembiayaan di bank					



IAIN PALOPO

3. Pembiayaan UMKM

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Pembiayaan saya selama pandemi covid-19 lancar					
2.	Pembiayaan yang di ambil di bank syariah sepenuhnya digunakan untuk modal usaha					
3.	Jangka waktu pinjaman tergolong lama sehingga meringankan pembayaran					
4.	Mampu membayar pembiayaan di masa pandemi covid-19					



IAIN PALOPO

Lampiran 2. Tabulasi Data

NO	PENDAPATAN (X1)					KEBIJAKAN PEMERINTAH (X2)					PEMBIAYAAN (Y)				
	P1	P2	P3	P4	TOTAL	P1	P2	P3	P4	TOTAL	P1	P2	P3	P4	TOTAL
1	4	4	5	3	16	3	1	1	3	8	3	3	3	2	11
2	3	2	2	3	10	2	1	1	2	6	3	3	3	3	12
3	3	3	2	2	10	2	1	1	2	6	3	3	3	3	12
4	2	2	2	3	9	3	3	1	1	8	3	2	3	3	11
5	2	2	2	2	8	2	1	1	1	5	4	3	3	3	13
6	1	2	2	1	6	4	1	1	3	9	3	3	4	3	13
7	2	1	1	1	5	4	2	2	3	11	1	1	1	1	4
8	3	2	1	2	8	3	1	1	2	7	3	2	3	4	12
9	2	1	2	2	7	4	1	1	1	7	2	3	1	1	7
10	2	2	2	3	9	3	1	1	3	8	3	3	4	2	12
11	4	2	2	2	10	4	1	2	2	9	1	2	2	3	8
12	2	2	1	2	7	1	1	2	4	8	1	1	2	2	6
13	2	2	2	2	8	3	2	1	3	9	2	1	3	1	7
14	2	2	2	3	9	3	3	2	3	11	2	2	2	3	9
15	4	2	2	2	10	2	1	2	2	7	2	2	3	3	10
16	2	2	3	3	10	3	1	1	1	6	3	3	4	3	13
17	2	2	2	2	8	2	1	2	4	9	3	3	3	3	12
18	3	3	2	2	10	3	1	3	3	10	3	3	3	3	12
19	3	2	2	2	9	3	3	3	3	12	3	3	3	2	11
20	3	1	1	2	7	2	2	1	1	6	2	2	3	2	9
21	3	2	2	2	9	2	2	2	2	8	2	1	2	4	9
22	3	2	2	1	8	2	1	1	4	8	2	2	2	2	8
23	2	2	2	2	8	2	1	1	2	6	2	2	3	2	9
24	3	2	3	4	12	3	1	1	3	8	3	3	3	3	12
25	2	2	2	2	8	2	1	1	2	6	2	2	3	2	9
26	3	2	2	3	10	1	1	1	1	4	3	3	4	2	12
27	3	2	2	2	9	2	2	2	3	9	3	3	3	2	11
28	4	2	1	1	8	3	2	2	2	9	1	1	1	1	4
29	3	2	2	2	9	2	2	2	3	9	2	2	2	3	9
30	2	3	2	1	8	2	1	3	4	10	2	2	2	3	9

Lampiran 3 Hasil Analisis Data

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Pendapatan (X1)

Item Soal	r-hitung	Tingkat Signifikan	Keterangan
X1.1	0,542 > 0,361	0,05	Valid
X1.2	0,449 > 0,361	0,05	Valid
X1.3	0,716 > 0,361	0,05	Valid
X1.4	0,576 > 0,361	0,05	Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas kebijakan pemerintah(X2)

Item Soal	r-hitung	Tingkat Signifikan	Keterangan
X2.1	0,396 > 0,361	0,05	Valid
X2.2	0,553 > 0,361	0,05	Valid
X2.3	0,253 > 0,361	0,05	Valid
X2.4	0,624 > 0,361	0,05	Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Pembiayaan (Y)

Item Soal	r-hitung	Tingkat Signifikan	Keterangan
Y.1	0,904 > 0,361	0,05	Valid
Y.2	0,853 > 0,361	0,05	Valid
Y.3	0,844 > 0,361	0,05	Valid
Y.4	0,636 > 0,361	0,05	Valid

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1, X2,dan Y

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
----------	----------------------	------------

Pendapatan (X1)	0,628	Reliabel
Kebijakan Pemerintah (X2)	0,602	Reliabel
Pembiayaan (Y)	0,801	Reliabel

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,17608182
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,068
	Positive	,068
	Negative	-,065
Test Statistic		,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,552	2,832		3,020	,005		
	Pendapatan(X1)	,490	,217	,380	2,260	,032	,982	1,018
	Kebijakan pemerintah (X2)	-,378	,226	-,281	-1,670	,106	,982	1,018

a. Dependent Variable: Y

Tabel 4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	1,910	1,461		1,308	,202		
	Pendapatan (X1)	-,169	,112	-,270	-1,513	,142	,982	1,018
	Kebijakan pemerintah (X2)	,170	,117	,259	1,454	,157	,982	1,018

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,552	2,832		3,020	,005
	Pendapatan (X1)	,490	,217	,380	2,260	,032
	Kebijakan Pemerintah (X2)	-,378	,226	-,281	-1,670	,106

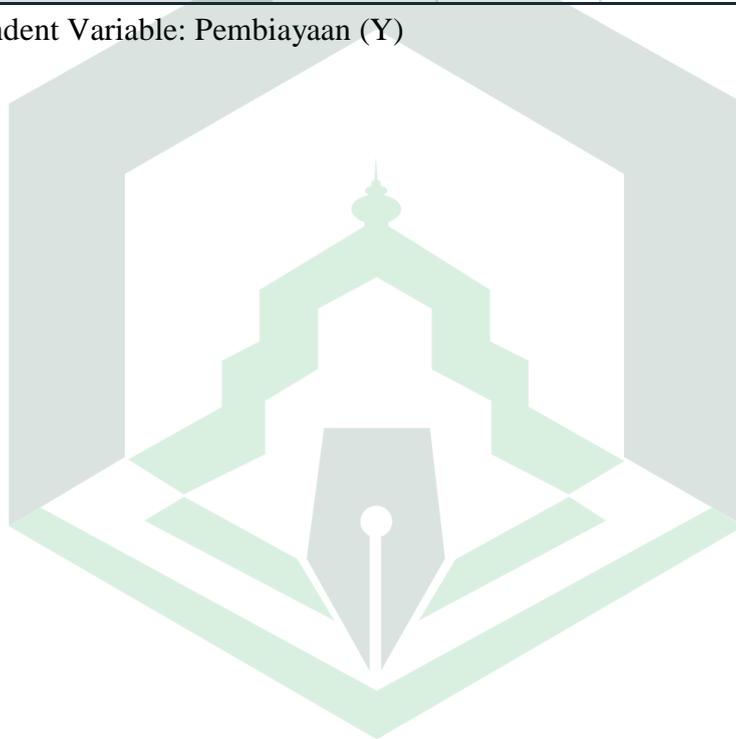
a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 4.12. Hasil Uji T

		Coefficients ^a		Standardize d Coefficients Beta	T	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	8,552	2,832		3,020	,005
	Pendapatan (X1)	,490	,217	,380	2,260	,032
	Kebijakan pemerintah (X2)	-,378	,226	-,281	-1,670	,106

a. Dependent Variable: Pembiayaan (Y)



IAIN PALOPO